

PERENCANAAN KAWASAN KOPI DI BENGKULU (Analisis Keterlibatan Petani dan Peran Pemerintah)



Fery Murtiningrum^{1*)}, Melinda Noe¹⁾, Sri Wahyuni¹⁾, Dodi Devianto¹⁾

¹Universitas Andalas

*Corresponding author: bundaabigueva@gmail.com

To cite this article:

Murtiningrum, F., Noer, M., Wahyuni, S., & Devianto, D. (2025). Perencanaan Kawasan Kopi di Bengkulu (Analisis Keterlibatan Petani dan Peran Pemerintah). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 10(1), 109–119. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v10i1.1818>

Received: February 09, 2025; Accepted: March 31, 2025; Published: March 31, 2025

ABSTRACT

Effective development planning is essential for achieving economic and agricultural goals, including developing coffee-growing areas. However, research on the role of farmers in this process remains limited. This study examines the planning process for coffee-growing area development in Bengkulu Province and the extent of farmer involvement in the process. The research was conducted in Kepahiang and Rejang Lebong Regencies in 2024, purposively selected as the two largest coffee-producing regions in Bengkulu. A total of 110 farmers from Kepahiang and 227 from Rejang Lebong were chosen through simple random sampling. The study analyzed variables related to the planning process, farmer empowerment through data access (including access to information, participation, inclusivity, and local institutional capacity), and community perceptions measured using a Likert scale. Findings indicate that the government plays a central role as the leading sector in coffee area development. Meanwhile, farmer groups primarily propose activities, provide data, and implement planned programs. Farmer participation mainly involves data collection and program preparation. Meetings provide equal opportunities for farmers to voice their opinions, with no restrictions on participation in group activities or discussions with agricultural offices and extension workers. Additionally, local institutions, particularly farmer groups, facilitate integrating farmers into the planning process. The study highlights the need for more substantial farmer involvement and institutional support to improve planning effectiveness and ensure sustainable coffee area development. Strengthening collaboration between government agencies, farmer organizations, and agricultural extension workers is recommended to enhance decision-making, increase inclusivity, and improve long-term development outcomes. Policies encouraging active farmer participation and institutional capacity-building will be crucial for achieving sustainable and equitable development in coffee-growing areas.

Keywords: area; coffea; development; farmers; planning.

PENDAHULUAN

Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari hasil penelitian yang disiapkan penulis untuk sebuah disertasi. Pemikiran awal penelitian ini berangkat dari fakta bahwa belum ada penelitian yang secara khusus meninjau peran petani dalam perencanaan kawasan pertanian dan keterlibatan masyarakat sejak awal (proses perencanaan bottom-up) a keterlibatan masyarakat mulai dari awal proses perencanaan dilakukan (proses bottom up perencanaan) pada perencanaan pembangunan di sebuah Kawasan. Perencanaan yang disusun umumnya bersifat top-down, mengikuti visi dan misi pemimpin terpilih. Sementara itu perencanaan yang baik dibutuhkan agar bisa sesuai dengan kondisi masyarakat setempat karena perencanaan yang baik akan sangat membantu suatu pembangunan berencana (Fadlina, et al, 2013) dan pembangunan manusia secara berkelanjutan (Rustiadi. et al 2009); (Kabul Mahi, 2017). Perencanaan merupakan suatu upaya dalam memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan (Susanto, 2016). Pembangunan merupakan proses yang



dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000); (Rustiadi. et al, 2009) (Sinurat, 2023). Agar tujuan pembangunan tercapai maka penting adanya perencanaan yang baik, perencanaan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan hambatan (Budianta, 2010); (Rositasari & Mulyadi, 2022) yang melibatkan semua aktor (Staricco & Vitale Brovarone, 2018); (Liu et al., 2020) ; (Zhao et al., 2019); (Spies et al., 2019) dari semua unsur stakeholder bersinergi sesuai dengan peran masing masing berdasarkan tugas dan fungsinya (Susanto, 2016), (Oliveira & Hersperger, 2018) dan memperhatikan budaya lokal, nilai nilai dan tujuan yang ingin di capai (Flynn et al., 2018) dan aspek sosial politik (Chettiparamb, 2019). Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mensinkronkan semua aspek dalam perencanaan yang sistematis dan terukur. Secara sederhana perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2016). Perencanaan melibatkan unsur fakta, tujuan dan arah kebijakan. Fakta adalah kondisi saat ini sebagai titik awal yang diperluan dalam menentukan tujuan perencanaan. Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan tercapai pada kurun waktu tertentu dan arah kebijakan merupakan rambu rambu atau petunjuk yang membolehkan atau tidak suatu cara dilakukan dalam mencapai tujuan.

Pembangunan tidak dapat berjalan spontan melainkan melalui proses yaitu perencanaan pembangunan. Untuk itu menjadi sangat penting menyusun sebuah perencanaan pengembangan kawasan pertanian didalam pembangunan pertanian (Spataru, et al 2020); (Chettiparamb, 2019). Penting adanya kebijakan perencanaan yang jelas, agar tidak terjadi persoalan terkait dengan kegiatan pertanian, yang dapat memicu fragmentasi tanah, perambahan, dan peningkatan nilai tanah, sehingga meningkatkan tekanan pada pertanian yang ada dan untuk memperhatikan kondisi lahan, cuaca dan iklim di kawasan yang akan di kembangkan agar dapat menghasilkan produksi yang optimal (Murtiningrum, 2019).

Perencanaan dengan menggunakan pendekatan pengembangan kawasan pertanian dimaksud untuk meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing komoditas unggulan nasional, efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. Dengan arah pengembangan kawasan yaitu fokus komoditas, keterpaduan kegiatan, lokasi kegiatan, pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Penerapan pengembangan kawasan pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi sumber daya kawasan. Perencanaan yang tepat akan mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai serta menimbulkan dampak positif bagi daerah (Barambae, Yuliet Elviseni, 2019), (Tarigan, 2016). Hal lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana membuat strategi agar tujuan yang direncanakan tercapai (Barambae, Yuliet Elviseni, 2019).

Proses perencanaan pengembangan kawasan pertanian ini, wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian telah ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Menteri Pertanian R.I. No. 830/kpts/R.C.40/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Indonesia yang kemudian di perbaharui melalu SK Menteri Pertanian .R.I No. 472/kpts/R.C.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Kabupaten yang di tetapkan menjadi lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Indonesia untuk Komoditi Kopi di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan studi literatur hasil penelitian mengenai perencanaan pengembangan kawasan, seperti pada (Pyrialakou et al., 2019), (Staricco & Vitale Brovarone, 2018) yang menjelaskan pentingnya keterlibatan semua aktor dalam perencanaan dan penelitian, (Flynn et al., 2018) juga menjelaskan tentang pelibatan masyarakat dengan memperhatikan budaya lokal dan nilai, selain itu penting adanya dorongan motivasi publik untuk berpartisipasi dalam perencanaan (Grindsted, 2016) (Delitheou et al., 2019). Gyergyay et al., (2019) juga menjelaskan pentingnya pemangku kepentingan dalam perencanaan, tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus meninjau bagaimana keterlibatan dan posisi petani terhadap perencanaan pengembangan kawasan, serta bagaimana persepsi petani pada perencanaan kawasan. Perencanaan pengembangan kawasan kopi telah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, dan telah terjadi juga perubahan paradigma perencanaan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up*. Novelty pada penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana keterlibatan dan posisi petani yang ada dilokasi kawasan pengembangan kopi dalam proses perencanaan pengembangan kawasan kopi menjadi bagian dari proses *bottom up* ini perlu untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses perencanaan pengembangan kawasan kopi di Provinsi Bengkulu dilakukan.

BAHAN DAN METODE

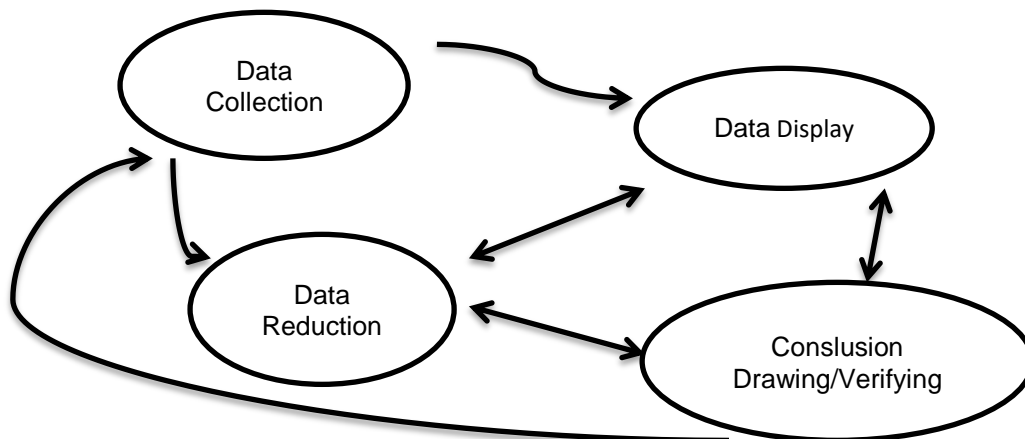
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kabawetan (Kabupaten Kepahiang) dan Kecamatan Sindang Dataran (Kabupaten Rejang Lebong), Provinsi Bengkulu, pada tahun 2024. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan dari 9 Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong adalah 2 Kabupaten Penghasil kopi terbesar pertama dan kedua, Total lebih dari 50% Kopi di Provinsi Bengkulu di hasilkan dari 2 Kabupaten ini. Selain itu 2 Kabupaten ini telah di tetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian tentang Lokasi Pengembangan kawasan Pertanian Indonesia.

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat di lokasi pengembangan kawasan kopi dalam hal ini adalah pemilik lahan kopi, petani penggarap dan buruh tani baik yang tergabung dalam kelompok tani kopi ataupun yang tidak tergabung dalam kelompok tani kopi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *simple random sampling* dengan dasar pertimbangan populasi relatif homogen yang melakukan kegiatan usaha tani kopi sehingga di anggap representatif untuk mewakili populasi petani di lokasi penelitian, dengan penentuan jumlah responden menggunakan tabel acak (Sugiyono 2016) dengan derajat kesalahan 5%, maka masing masing wilayah kecamatan akan di ambil sampel 227 petani kopi dari Sindang Dataran dan 110 petani kopi dari Kabawetan. Selain itu juga dilakukan wawancara secara semi-terstruktur yang mendalam dengan pejabat pemerintah yang berhubungan dengan proses perencanaan pengembangan kawasan kopi. Responden di ambil dengan metode *snowball* , untuk memahami bagaimana berbagai kelompok dalam masyarakat lokal terlibat pada proses perencanaan ini dilakukan serangkaian diskusi kelompok terarah dengan para tokoh masyarakat yang ada di lokasi pengembangan kawasan kopi ini.

Penelitian ini dilakukan terhadap proses perencanaan pengembangan kawasan Kopi di tingkat Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Variabel penelitian berupa proses perencanaan pengembangan kawasan kopi, pemberdayaan dengan element akses data yaitu akses informasi, partisipatif, inklusif dan kapasitas kelembagaan lokal dengan fokus data berupa deskripsi informasi mengenai akses data tersebut yang kemudian di fokuskan pada persepsi masyarakat yang diukur dengan skala *likert* kemudian ditabulasi dan di deskripsikan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data data dari dokument, peraturan perundangan, peraturan daerah, dan undang undang yang berlaku.

Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif (Raco, 2010), (Sugiyono, 2018),(Sarosa, 2021), (Alaslan et al., 2023), analisis kuantitatif menggunakan metode pembobotan *scala likert*.

Variable data yang digunakan yaitu akses informasi dengan indikator materi informasi, media informasi, kemudahan mendapatkan informasi dan kredibilitas informasi. Variabel Partisipatif dengan indikator *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*. Variabel Inklusif dengan indikator terbuka terhadap keberagaman, toleransi, dan kemudahan berinteraksi, variable kelembagaan lokal dengan indikator Ketersediaan lembaga lokal sebagai wadah membuat perencanaan, Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam perencanaan. Variabel Pemberdayaan dengan indikator ada kesempatan, ada kemauan dan ada kemampuan.



Gambar 1. *Analysis interactive model*

Proses analisa data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan analisis data menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles (Matthew B.Miles, & Huberman, 2013) yaitu membagi kegiatan analisa menjadi beberapa bagian pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ditampilkan gambar model "*Analysis Interactive*":

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini dilihat dari kategori umur, jenis kelamin, lama berusaha tani, pendidikan dan luas lahan.

Tabel 1. Karakteristik responden

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1.	Umur (Tahun)		
	Muda; (< 35)	29	9
	Sedang ; (35 ≤ X ≤ 55)	287	85
	Tua; > 55	21	6
2.	Jenis Kelamin		
	Laki Laki	323	96
	Perempuan	24	4
3.	Kategori Lama Berusaha Tani (Tahun)		
	4 s/d 17	95	28
	18 s/d 31	228	68
	32 s/d 42	14	04
4.	Pendidikan		
	SD	117	35
	SMP	145	43
	SMA	70	21
	S1	5	1
5.	Luas Lahan (Ha)		
	Kecil; < 0,5	7	2
	Menengah; 0,5 - 1	94	28
	Luas > 1	236	70

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Hasil penelitian yang dilakukan, kategori umur petani kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berkisar dari umur < 35 tahun (usia muda) yaitu 29 orang dari 337 orang sampel atau 9% dari keseluruhan petani yang menjadi sampel. Untuk petani yang berumur kisaran 36 sampai 55 tahun yaitu 287 orang atau 85%, Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani berada pada usia produktif. Menurut (Mubyarto, 1986) usia produktif menunjukkan bahwa petani dapat optimal dan maksimal berusaha tani sehingga produktifitas kerja juga maksimal. Pada usia ini petani memiliki semangat dan tenaga yang kuat untuk menjalankan usaha tani dan cenderung mau aktif dengan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi usaha pertanian mereka. Pada usia produktif ini, petani aktif dalam usaha tani serta cenderung terbuka dan kritis dalam menerima inovasi sehingga dalam kegiatan lebih aktif untuk bisa berpartisipasi dalam segi pemberdayaan, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan terlibat dalam proses perencanaan.

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dari hasil penelitian di ketahui bahwa 96% responden adalah laki-laki, dan 4 % adalah perempuan, Hal ini dikarenakan laki-laki umumnya merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, termasuk kegiatan usaha tani dan pertemuan-pertemuan pada penyusunan perencanaan laki-laki adalah pihak yang dilibatkan. Sangat kecil sekali perempuan yang terlibat dan jikapun terlibat perempuan tersebut adalah perempuan kepala keluarga.

Pengalaman usaha tani, Pengalaman bertani dihitung berdasarkan lama waktu petani melakukan kegiatan usaha tani. Pengkategorian dibagi menjadi 3 bagian yaitu kategori cukup berpengalaman, berpengalaman dan sangat berpengalaman. Lama berusaha tani untuk cukup berpengalaman 28 %, untuk berpengalaman 68% dan sangat berpengalaman dengan lama 32 tahun keatas sebanyak 4%. Pengalaman berusaha tani memungkinkan petani mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari tradisi kegiatan usaha tani, mulai dari persiapan

lahan, pembuatan teras, penanaman penabung sementara dan tetap, kemudian dilanjutkan pada tahap pembuatan lubang tanam, pengisian pupuk kandang kedalam lubang tanam, proses penanaman kopi dan dilanjutkan pada proses pemeliharaan yang meliputi pemangkasan kopi pada tanaman belum berbuah atau belum menghasilkan (TBM), pangkas pemeliharaan lepas panen pada saat tanaman sudah berbuah atau menghasilkan sesudah panen.

Karakteristik pendidikan berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa petani di lokasi rencana pengembangan kawasan 35% berpendidikan SD, 43 % SMP, 21% SMA, dan 1 % berpendidikan S1, yang menunjukkan bahwa pada tataran pendidikan SMP dan SD dengan kata lain masih pada sekolah menengah kebawah. Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan penerimaan seseorang terhadap informasi-informasi baru yang mereka terima yang memotivasi mereka terlibat dalam melakukan kegiatan (Marphy & Priminingtyas, 2019). Semakin tinggi tingkat pendidikan kecenderungan untuk menerima informasi dan tanggap terhadap suatu proses akan menjadi lebih cepat.

Sementara untuk luas lahan menurut (Sajogyo, 1977) membagi atau mengelompokkan luas lahan menjadi tiga kategori yaitu petani skala kecil dengan luas lahan usahatani < 0,5 ha, skala menengah dengan luas lahan pertanian 0,5 – 1,0 ha, dan skala luas dengan luas lahan usaha tani > 1,0 ha. Setelah di kelompokkan hasil penelitian didapatkan bahwa luas lahan 70% diatas 1 Ha, . Rentang luas lahan ini masuk dalam kategori lahan luas maksimal, tetapi kondisi yang didapatkan hasil produksi belumlah optimal. Hasil pertanian yang belum optimal ini membutuhkan upaya pengembangan dan inovasi agar petani mampu menghasilkan produksi yang lebih optimal sehingga mampu menutupi ongkos produksi dan dapat memenuhi kebutuhan hidup petani. Inovasi teknologi dibutuhkan agar dengan luas lahan yang katagori luas maksimal ini petani mampu menghasilkan produksi yang optimal.

Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi

Kegiatan perencanaan pengembangan kawasan kopi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses perencanaan pengembangan kawasan kopi. Mereka hanya mendengar bahwa di wilayah mereka akan dilakukan kegiatan pengembangan kawasan kopi, materi Informasi yang mereka terima adalah bagaimana peningkatan hasil buah kopi dan cara pengendalian hama tanaman kopi, bagaimana cara menanam dan melakukan penyetakan serta pemupukan yang baik dan benar. Informasi mengenai penyambungan jenis kopi, perawatan tanaman kopi yang menurut mereka penting bagi usaha tani kopi mereka. Informasi ini mereka dapatkan dari ketua kelompok baik di sampaikan secara langsung pada saat pertemuan bulanan kelompok tani, dengan di dampingi oleh penyuluh pertanian ataupun tidak di dampingi penyuluh pertanian. Informasi juga mereka terima melalui pesan lewat whatsapp Hp, sesekali melalui pengumuman di masjid. Mereka jarang mendapatkan informasi melalui koran. Menurut mereka materi informasi yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka mengenai usaha tani kopi yang mereka lakukan, informasi mengenai bahwa ada rencana pengembangan kawasan kopi di wilayah mereka yang di dapatkan pada saat kumpul pertemuan kelompok. Informasi mengenai harga penjualan kopi yang kadang naik kadang turun, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak begitu memahami apa perencanaan pengembangan kawasan kopi itu. Ada juga yang menyampaikan bahwa informasi yang mereka ketahui berkaitan dengan cara pemupukan, penyemprotan, penggilingan dan pasca panen. Perawatan kopi sampai pengolahan kopi dan cara membedakan kelas-kelas kopi. Informasi yang dapatkan, mereka percayai kebenarannya, karena menurut mereka informasi tersebut berguna untuk peningkatan usaha tani kopi yang mereka lakukan, dan menurut mereka secara logika masuk sesuai dengan kondisi dan informasi yang mereka dapatkan dari orang yang mereka percaya yaitu dari ketua kelompok, petugas penyuluh pertanian dan sesekali dari petugas Dinas Pertanian yang datang berkunjung pada saat mereka melakukan pertemuan pertemuan kelompok.

Menurut Ariaoktafiani, (2024) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan langkah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, Sementara itu berdasarkan hasil penelitian dari sisi partisipasi masyarakat keterlibatan langsung dalam pertemuan pertemuan yang membahas perencanaan pengembangan kawasan kopi belum ada. Berdasarkan hasil wawancara di ketahui bahwa pertemuan kelompok secara rutin setiap bulannya dilakukan, baik itu bersama penyuluh pertanian ataupun pertemuan yang hanya di hadiri oleh internal anggota kelompok, dan sesekali mendapatkan kunjungan dari Dinas Pertanian bukan dalam rangka membahas perencanaan pengembangan kawasan. Diskusi-diskusi yang dilakukan pada pertemuan kelompok yang mereka lakukan berupa informasi mengenai harga jual kopi, sosialisasi akan dilakukan kegiatan atau adanya bantuan dari Dinas Pertanian, dimana kemudian kelompok di minta untuk menyusun rencana kerja kelompok. Pertemuan pertemuan ini juga membahas mengenai cara

perawatan kebun yang baik agar dapat menghasilkan kopi yang banyak berbuah lebat dan harga yang bagus. Cara pemupukan dan pemberian obat yang baik untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman kopi, ada juga informasi mengenai bahwa lokasi perkebunan mereka akan dijadikan pusat kopi dan sentral pelatihan anak-anak mahasiswa. Selain itu menurut mereka penting adanya informasi mengenai pemasaran kopi. Secara umum mereka biasanya hadir pada pertemuan-pertemuan kelompok yang sebelumnya sudah disampaikan oleh ketua kelompok jadwal dan lokasi pertemuannya. (mendapatkan informasi mengenai rencana pertemuan kelompok). Namun terkadang mereka juga tidak hadir dalam pertemuan jika jadwalnya berbenturan dengan kesibukan mereka. Kesadaran untuk hadir pada pertemuan kelompok ini menurut mereka penting agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan usaha tani kopi yang mereka lakukan. Tetapi untuk pertemuan pertemuan diluar kelompok seperti hadir di pertemuan tingkat Kecamatan atau Kabupaten biasanya hanya ketua kelompok yang di undang untuk hadir, kecuali ketua berhalangan hadir kemudian diwakilkan oleh salah satu anggota kelompok. Secara umum informasi mengenai perencanaan pengembangan kawasan kopi tidak mereka ketahui kecuali beberapa orang ketua kelompok yang diundang pada pertemuan ditingkat kabupaten pada pelaksanaan Fokus Grup Diskusi yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, sehingga dengan dasar ini bahwa mereka tidak mengetahui dan tidak memahami tujuan dari proses perencanaan pengembangan kawasan kopi. "belum ada penjelasan mengenai hal ini", atau "tidak paham karena belum ada informasi dan penjelasan mengenai hal ini" atau "belum paham karena saya tidak hadir".

Pertemuan-pertemuan kelompok yang mereka lakukan pada setiap bulannya menurut mereka memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, tidak ada perbedaan apakah mereka masuk dalam kategori mampu, kurang mampu. Tetapi ada juga yang menyampaikan tidak mengetahui karena tidak ikut pertemuan kelompok atau sedang tidak bisa hadir pada pertemuan kelompok. Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan di sampaikan Gregolin et al., (2018) Pembangunan sejati terjadi melalui proses oleh masyarakat melalui pelatihan, pemberdayaan aktor dan peran agen. Tetapi berkaitan dengan proses perencanaan pengembangan kawasan kopi mereka tidak mengetahui, kurang paham karena belum ada informasi.

Tabel 2. Element element Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Kawasan Kopi

No	Element Pemberdayaan	Persepsi Responden (%)				
		STS	TS	CS	S	SS
1	Akses Informasi					
	Materi Informasi	1	34	37	17	11
	Media Informasi	1	27	47	24	1
	Kemudahan Mendapatkan Informasi	0	31	32	36	1
	Kredibilitas Sumber Informasi	0	2	32	45	22
2	Partisipatif					
	Planning	0	34	50	16	0
	Organizing	13	38	25	18	7
	Actuating	13	44	19	17	7
	Controlling/Monitoring dan evaluasi	8	49	26	13	5
3	Inklusif					
	Terbuka terhadap keberagaman	0	45	26	26	4
	Toleransi	3	26	39	22	10
4	Kemudahan berinteraksi	0	5	43	37	15
	Kapasitas Kelembagaan Lokal					
	Ketersediaan lembaga lokal	0	18	39	38	5
	Ketersedian SDM yang memiliki Pengetahuan tentang perencanaan	0	17	36	37	10
	Ketersedian SDM yang memiliki kemampuan	1	19	44	29	7

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Kelembagaan lokal yang ada berupa kelompok kelompok tani. Melalui kelompok kelompok tani ini informasi mengenai pengembangan kawasan kopi disampaikan oleh Dinas Pertanian baik secara langsung atau melalui penyuluh pertanian. Terdapat kelompok karang taruna, kelompok pengajian, kelompok remaja dan PKK di desa tetapi tidak dilibatkan dalam kegiatan pengembangan kawasan kopi. Berdasarkan diskusi dan hasil wawancara kebutuhan untuk pengembangan kawasan kopi berupa penyuluhan, modal, bimbingan pemasaran, informasi mengenai pemasaran kopi, bibit

unggul, bantuan pupuk, dan rumah jamur, lahan penjemuran (*solar drayer*), Cara budidaya, perawatan, teknik pengolahan lahan dan pasca panen, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Informasi mengenai pupuk dan subsidi pupuk dan jika ada bantuan seperti pupuk subsidi dan lain lainnya. Kebutuhan lainnya berupa pelatihan untuk pengembangan SDM petani, alat pengolahan lahan, bimbingan serta kestabilan harga dan adanya pertemuan belajar terkait pertanian kopi.

Berdasarkan data persepsi masyarakat terlihat bahwa materi informasi yang diterima oleh responden cukup setuju bahwa mereka menerima informasi mengenai perencanaan. Media informasi yang sering digunakan melalui informasi yang di sampaikan ketua kelompok, lewat Hp, pesan WA yang menurut mereka informasi tersebut dengan mudah di terima dan mereka percaya karena yang menyampaikan adalah ketua kelompok yang di percaya atau juga melalui Dinas Pertanian sebagai pembina. Informasi ini menurut mereka berupa rencana program yang akan dilakukan di wilayah mereka, tetapi proses penyusunan tidak mereka ketahui.

Sementara untuk element partisipatif, ketika mereka mendapatkan informasi maka mereka cenderung 50% mau berpartisipasi dalam kegiatan atau mau datang terlibat pada proses jika di ajak dan diberitahu, tetapi sejauh ini informasi proses perencanaan untuk pengorganisasian dan pengarahan tidak mereka dapatkan, terlihat dari nilai persepsi partisipatif dengan indikator organizing adalah 38% dan 44% tidak setuju untuk indikator *actuating*. Pengorganisasian dan *actuating* (pengarahan) kegiatan yang ada adalah pada tahap pelaksanaan program, dimana mereka adalah sebagai penerima program. Demikian juga pada tahap evaluasi *controlling* terhadap perencanaan 49% tidak setuju dan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat sama sekali pada tahapan ini.

Kesempatan untuk perencanaan ini tidak semua masyarakat terlibat, biasanya hanya pengurus kelompok, ketua dan sekretaris, dan inipun tidak semua kelompok petani di libatkan, terlihat dari hasil penelitian 45% menyatakan tidak setuju proses ini terbuka terhadap keberagaman (kebhinekaan), tetapi mengakui bahwa pada pertemuan pertemuan biasanya toleransi berupa menghargai pendapat orang lain telah ada.

Kapasitas kelembagaan lokal, 39% mengatakan cukup setuju ada kelembagaan lokal di masyarakat berupa kelompok tani yang 36 % diakui memiliki pengetahuan dan 44% memiliki kemampuan, Potensi ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan dan keberdayaan masyarakat telah ada dan semestinya dimanfaatkan oleh pemerintah dengan melibatkan mereka secara aktif pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi sebagaimana di sampaikan Ahmad Sururi & Rahmi Mulyasih, (2017) bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk merancang perencanaan melalui wadah organisasi

Gambaran Proses Penyusunan Dokument Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan di dapatkan hasil bahwa Program pengembangan kawasan kopi untuk Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan program yang di susun oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten bersifat menjalankan dan mendukung Program tersebut". Dari informasi yang di peroleh saat wawancara di tingkatan pemerintah kabupaten menunjukkan sikap sebagai pelaksana perintah atasan (*top-down*) dan bukan lahir dari permintaan dan kebutuhan di bawah (*bottom-up*). Sehingga kemudian dalam perjalanannya pemerintah provinsi mulai beralih "isu" dari Komoditi Kopi ke Komoditi Sawit karena suport pihak ketiga untuk komoditi sawit ini lebih banyak sehingga saat ini lokus pemerintah provinsi beralih ke komoditi sawit, sementara itu petani kopi hanya mampu menunggu kelanjutan karena ini adalah "program pemerintah" (yang akan dilakukan pemerintah dengan kegiatan pengembangan kopi) di wilayah mereka. Sehingga ketika program ini tidak mendapatkan support pendanaan lagi kegiatan menjadi terhenti.

Hasil wawancara dengan informan juga di dapatkan informasi bahwa kegiatan berjalan ketika ada suport pendanaan, kendala dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas, sehingga mencari suport dana dari Provinsi dan Pusat yang menyebabkan ketergantungan dengan bentuk program yang ditawarkan pihak luar yang memiliki dana, Saat 2017 program fokus ke pengembangan kawasan kopi, ketika habis program dan isu beralih ke produk lain, maka fokus juga beralih, hal ini menunjukkan sangat tingginya ketergantungan dengan pemerintah daerah.

Kegiatan pengembangan kawasan kopi di laksanakan oleh leading sektor yaitu pada Dinas Pertanian, untuk suport kegiatan dari pusat berupa bantuan mesin peralatan pasca panen. Bentuk kebijakan yang dikeluarkan berupa SK Kampung kopi, hal ini merupakan bentuk suport yang di berikan pemda setempat karena menurut informan program pengembangan kawasan kopi ini merupakan program Pemerintah Provinsi.

Pihak-pihak yang dilibatkan pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi menurut hasil wawancara dengan informan yaitu Bappeda sebagai mitra, Dinas Pertanian sebagai tim teknis. Kelompok tani sebagai pelaksana dan bagian keuangan untuk suport pendanaan.

Petani dilokasi kawasan pengembangan kawasan kopi dilibatkan dalam proses pelaksanaan mulai dari tahapan sosialisasi petik merah, pembinaan kelompok tani, pemilihan kelompok tani (CPCL/ Calon penerima calon lokasi) kemudian kelompok tani membuat proposal kegiatan dengan disertai RDKK (Rencana Defenitif kerja kelompok) yang di dampingi Penyuluh. Proses ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketika petani atau kelompok ingin mendapatkan akses dari program yang dilaksanakan. Usulan ini disampaikan dari kelompok ke BPP, Kemudian ke Dinas Pertanian baru setelah itu kelompok tani mendapatkan bantuan. Sehingga dari temuan di lapangan didapatkan bahwa pada perjalannya tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan untuk suport kegiatan pengembangan kawasan kopi ini.

Penyusunan perencanaan pengembangan kawasan kopi bersifat teknokratik. Master plan disusun oleh tim ahli dari IPB, dengan pendanaan dari Dinas pertanian Provinsi Untuk action plan disusun oleh tim ahli dari Universitas Bengkulu (UNIB) dan tim dari Universitas Pat Petulai (UPP) dengan pendanaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang dan Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. Dalam proses pengambilan data melibatkan petani sebagai sumber data/sumber pengambilan data.

Pada penyusunan *Action plan* di lakukan FGD, Sosialisasi, dan wawancara kepada kelompok tani. Perwakilan kelompok tani menghadirkan ketua dan anggota. Penggalan data dilakukan pada saat FGD, sosialisasi dan wawancara. Penentuan perwakilan kelompok yang hadir di dasarkan pada keaktifan kelompok berkomunikasi dengan Dinas Pertanian, Penyuluh dan Pemerintah Desa. Tim Ahli meminta bantuan kepada Pemerintah Desa dan Penyuluh untuk menentukan perwakilan kelompok yang ikut hadir pada FGD.

Kelembagaan yang dilibatkan adalah Kelompok tani, Kelompok MPIG dan kepala-kepala desa diluar OPD terkait. Kenapa kelembagaan ini dilibatkan karena terkait dengan pengembangan kawasan, yang menjadi sumber khususnya petani kopi. MPIG; mereka penyokong utama kegiatan petani petik merah

Posisi Petani pada Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi

Petani yang berdaya menurut (Susetiawan, 2000) yaitu petani yang secara politik dapat mengartikulasikan atau menyampaikan perwujudan kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan proses tawar menawar dengan pihak lain, secara sosial dapat mengelola dan mengatur komunitas serta mengambil keputusan secara mandiri dan secara budaya diakui eksistensinya. Pemberdayaan petani merupakan suatu startegi yang dilakukan dengan menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proposional agar petani dapat berperan aktif secara aktivitas sosial kemasyarakatan (Anantanyu, 2011) dan tentunya pada program pembangunan dapat berperan mulai dari proses perencanaan pembangunan.

Pada proses perencanaan pengembangan kawasan kopi telah dilakukan penggalan kebutuhan masyarakat melalui FGD yang dilakukan secara berjenjang dan terpadu di lokasi pengembangan kawasan, FGD ini dilakukan dengan didampingi oleh pihak-pihak yang berkompeten seperti penyuluh pertanian. Hal ini dilakukan karena keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya di tentukan oleh kondisi sumberdaya pertanian tetapi juga ada peran penyuluh pertanian (Faqih, 2014). Penyuluh pertanian berperan strategis didalam mendukung program pembangunan pertanian pada upaya memberdayakan petani dan sebagai penyambung informasi dari Dinas terkait (Pemerintah) kepada masyarakat petani.

Petani melalui kelompok tani di berikan kesempatan bersuara (*voice*) agar mereka memiliki kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuai dengan keinginannya. Hal ini sejalan dengan di sampaikan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, (2015). Pada penelitian ini ditemukan bahwa keterlibatan petani hanya sebatas sebagai pelaksana program, bukan terlibat dari awal proses perencanaan. Dapat di katakan bahwa partisipasi masyarakat hanya memiliki peran secara simbolik (Lovrić & Lovrić, 2018). Pemberdayaan kelompok tani diartikan sebagai sebuah proses terencana yang berguna untuk meningkatkan skala/updrade utilitas dari objek yang diberdayakan dan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan bagian dari bentuk bentuk pemberdayaan masyarakat sejalan dengan yang di sampaikan Andayani, et al (2017). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan langkah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ariaoktafiani, 2024) sehingga dengan partisipasi aktif diharapkan setiap individu dapat memberikan masukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal dan berkomunikasi serta melakukan koordinasi dan komunikasi di antara berbagai dalam proses kebijakan (Gugerell et al., 2019) dan kebutuhan. Bentuk lain pemberdayaan dalam rangka menempatkan petani sebagai subjek pembangunan antara lain berupa memberikan kesempatan kepada petani terlibat aktif pada kegiatan pertemuan penyusunan rencana *master plan* atau *action plan* mengenai pengembangan kawasan. Informasi bisa di dapatkan petani

melalui pihak pertama yaitu OPD Teknis terkait seperti dinas pertanian, bisa juga di sampaikan secara langsung pada saat pertemuan pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tani, bisa juga langsung dari ketua kelompok tani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penting adanya keterlibatan petani yang lebih kuat dan dukungan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan memastikan pembangunan kawasan kopi yang berkelanjutan. Penguatan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi petani, dan penyuluh pertanian direkomendasikan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan inklusivitas, dan meningkatkan hasil pembangunan jangka panjang. Penting adanya kebijakan yang mendorong partisipasi aktif petani dan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mencapai pembangunan kawasan kopi yang berkelanjutan dan adil. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan aktif petani dalam proses perencanaan. Pelibatan ini bisa dilakukan melalui forum komunikasi rutin antara petani dan pemangku kepentingan.

REFERENSI

- Ahmad Sururi, & Rahmi Mulyasih. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rebug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 218–238. <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.17>
- Alasan, A., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., & Rahmi, S. (2023). *Penelitian Metode Kualitatif*. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrhb>
- Anantanyu, S. (2011). *Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. 7(2), 102–109.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Ariaoktafiani, P. (2024). *Strategi berkelanjutan untuk transformasi permukiman kumuh di kawasan pesisir tanjungmas semarang*. 2748(105).
- Barambae, Yuliet Elviseni. (2019). Perencanaan kawasan pariwisata di Kecamatan Tomohon Selatan. *Jurnal Spasial*, 6(2), 321–330.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(1), 72–82. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTek/article/view/628/546>
- Chettiparamb, A. (2019). Responding to a complex world: Explorations in spatial planning. *Planning Theory*, 18(4), 429–447. <https://doi.org/10.1177/1473095218820554>
- Delitheou, V., Bakogiannis, E., & Kyriakidis, C. (2019). Urban planning: integrating smart applications to promote community engagement. *Heliyon*, 5(5), e01672. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01672>
- Fadlina, I. M., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu) Sustainable Development of Agrocultural (Studies on Organic Agricultural Development in Batu City). *J-Pal*, 4(Perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan), 43–57.
- Faqih, A. (2014). Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam kegiatan pemberdayaan kelompok terhadap kinerja kelompok tani. *Agrijati*, 26(1), 41–60.
- Flynn, M., Ford, J. D., Pearce, T., & Harper, S. L. (2018). Participatory scenario planning and climate change impacts, adaptation, and vulnerability research in the Arctic. *Environmental Science and Policy*, 79(December 2016), 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.10.012>
- Gregolin, M. R., Gregolin, G. C., Mattia, V., Corbari, F., & Zonin, W. J. (2018). Avaliação Da Gestão Organizacional Em Cooperativas De Agricultores Familiares Do Estado Do Paraná. *Nativa*, 6(5), 457. <https://doi.org/10.31413/nativa.v6i5.6776>
- Grindsted, T. S. (2016). Regional planning, sustainability goals, and the mitch-match between educational practice and climate, energy, and business plans. *Journal of Cleaner Production*, 171, 1681–1690. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.197>
- Gugerell, K., Endl, A., Gottenhuber, S. L., Ammerer, G., Berger, G., & Tost, M. (2019). Regional

- implementation of a novel policy approach: The role of minerals safeguarding in land-use planning policy in Austria. *Extractive Industries and Society*, October, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.10.016>
- Gyergyay, B., Gomari, S., Friedrich, M., Sonnleitner, J., Olstam, J., & Johansson, F. (2019). Automation-ready framework for urban transport and road infrastructure planning. *Transportation Research Procedia*, 41, 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.09.018>
- Kabul Mahi, A. & I. S. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah* (1st ed.). Kencana.
- Liu, X., Liu, Y., Rui, Y., Zhang, J., & Zhao, X. (2020). Evaluation of sustainable agriculture and rural development in agro-pastoral ecotone under climate change: A comparative study of three villages in the Shenfu coalfield, China. In *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.016>
- Lovrić, N., & Lovrić, M. (2018). A network approach to constructing a theory of participation in spatial planning. *Land Use Policy*, 79(July), 30–47. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.038>
- Marphy, T., & Priminingtyas, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. *Habitat*, 30(2), 62–70. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.2.8>
- Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, J. S. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook No Title*. SAGE Publications.
- Mubyarto. (1986). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Edisi Revi). LP3ES. Jakarta.
- Murtiningrum, F. (2019). Perencanaan Pengembangan Kawasan Kopi Di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Jambi. *Agro Bali (Agricultural Journal)*, 2(2), 121–129.
- Oliveira, E., & Hersperger, A. M. (2018). Governance arrangements, funding mechanisms, and power configurations in current strategic spatial plan implementation practices. *Land Use Policy*, 76(August 2017), 623–633. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.042>
- Pyrialakou, V. D., Gkritza, K., & Liu, S. S. (2019). The use of focus groups to foster stakeholder engagement in intercity passenger rail planning. *Case Studies on Transport Policy*, 7(2), 505–517. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.12.009>
- Raco, J. R. (2010). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Rositasari, R., & Mulyadi, A. W. E. (2022). Kolaborasi Stakeholder dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Wacana Publik*, 2(2), 376. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66544>
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., D. R. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (A. E. Pravitasari (ed.); ke 4 Mei 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sajogyo. (1977). *Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan (Poor Household and Their Participation in Development)*. Prisma, VI(3):10-17.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT Kanisius. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YY9LEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=buku+penelitian+kualitatif&ots=gAA87W-4Mk&sig=wTxs9oiJgf9zPDRz5_mmK3RQuLM&redir_esc=y#v=onepage&q=buku penelitian kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YY9LEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=buku+penelitian+kualitatif&ots=gAA87W-4Mk&sig=wTxs9oiJgf9zPDRz5_mmK3RQuLM&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20penelitian%20kualitatif&f=false)
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Spataru, A., Faggian, R., & Docking, A. (2020). Principles of multifunctional agriculture for supporting agriculture in metropolitan peri-urban areas: The case of Greater Melbourne, Australia. *Journal of Rural Studies*, 74(October 2019), 34–44. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.11.009>
- Spies, J., Devisscher, T., Bulkan, J., Tansey, J., & Griess, V. C. (2019). Value-oriented criteria, indicators and targets for conservation and production: A multi-party approach to forest management planning. *Biological Conservation*, 230(March 2018), 151–168. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.11.022>
- Staricco, L., & Vitale Brovarone, E. (2018). Promoting TOD through regional planning. A comparative analysis of two European approaches. *Journal of Transport Geography*, 66(November 2017), 45–52. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.11.011>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2016). Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.

- Susetiawan. (2000). *Perubahan Paradigma Pembangunan. Bahan Pembelajaran TOT Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi*. 17-23 Nove.
- Tarigan, R. (2016). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara.
- Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (D. H. M. . Munandar (ed.)). Erlangga.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Ketiga). ALFABETA.
- Zhao, X., Ma, X., Tang, W., & Liu, D. (2019). An adaptive agent-based optimization model for spatial planning: A Anyue County, China case study. *Sustainable Cities and Society*, 51(June), 101733. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101733>